



Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Bung Hatta, Dr. Suparno, M. Si. bersama dengan 10 orang akademisi lainnya dari berbagai perguruan tinggi se-Indonesia tergabung dalam keanggotaan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 105/KEPMEN-KP/2020 tentang Keanggotaan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan tanggal 27 Oktober 2020, yang ditandatangani langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI (Edhy Prabowo). Keanggotaan komisi tersebut berjumlah sebanyak 35 orang yang terdiri atas para pakar, akademisi, dan pejabat instansi pemerintah terkait.

Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan RI adalah lembaga nonstruktural mandiri dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Mereka terdiri atas beberapa bidang keahlian, seperti biologi perikanan, pengkajian stok ikan, teknologi/kapasitas penangkapan ikan, bio-ekonomi perikanan, pengelolaan perikanan, biologi laut, ekologi perairan, limnologi, oseanografi, dinamika populasi, akustik perikanan, penginderaan jauh, sistem informasi geografis, dan statistik perikanan.

Dari kalangan akademisi, Dr. Suparno membidangi keahlian biologi laut, sedangkan 10 akademisi lainnya yang menggeluti bidang keahlian biologi perikanan, pengelolaan perikanan, sistem Informasi GIS, teknologi/kapasitas penangkapan ikan, pengkajian stok ikan, dinamika populasi ikan, dan pengendalian penangkapan ikan.

Dari kalangan pakar, terdapat lima orang yang berasal dari perwakilan IPB Bogor, Unpad, dan Unhas. Dua lainnya tidak disebutkan asal kampus atau institusinya. Bersama pakar dan akademisi, terdapat pula perwakilan instansi pemerintah, seperti Pusat Penelitian Oseanologi LIPI hingga Himpunan Pengusaha Penangkapan Udang Indonesia.

Dr. Suparno yang juga merupakan doktorat lulusan IPB tersebut telah mengantongi tiga sertifikat kompetensi, antara lain Sertifikat Asesor Kompetensi (2016) yang dikeluarkan oleh BNSP, Sertifikat Ahli Pengelola Sumberdaya Perairan (2016) yang juga dikeluarkan oleh BNSP, Sertifikasi Ahli Penilai Kondisi Padang Lamun (2019) yang dikeluarkan oleh BNSP dan LIPI.

Dr. Suparno juga berpengalaman sebagai Anggota Tim Validasi KLHS Dinas Lingkungan Hidup Sumbar, Anggota Komisi Amdal Dinas Lingkungan Hidup Sumbar, Anggota Tim Dewan Riset Daerah Balitbang Provinsi Sumbar, dan Penyusun Perda Rencana Zonasi Pesisir dan Laut Provinsi Sumatera Barat.

Di samping berpengalaman di bidangnya, sebagai dosen di FPIK Universitas Bung Hatta, saat ini, ia juga menjabat sebagai kepala Perpustakaan Universitas Bung Hatta. Pria kelahiran Kediri tahun 1969 itu juga telah banyak menghasilkan berbagai karya ilmiah di bidang perikanan dan kelautan. Tahun 2018, Dr. Suparno juga mendapat penghargaan Satyalancana Karya XX dari Presiden RI.

Kontributor: Indrawadi

Redaktur: Rio Rinaldi